

PAK HARTO:
MANAGEMENT KEPEMIMPINANNYA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL^{•)}
oleh Makrum^{••)}

1. Pendahuluan

Pak Harto adalah sosok yang memiliki jasa sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di tangannya, Indonesia dapat diselamatkan dari kehancuran akibat pemberontakan PKI, dan di tangannya pula pembangunan nasional bisa dilaksanakan, terutama dalam meraih swasembada pangan. Karena itu, menjadi kewajiban bagi kita, generasi penerus bangsa, untuk mengambil pelajaran dari beliau, terutama dari manajemen kepemimpinannya dalam pembangunan nasional, agar ke depan Indonesia lebih baik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan nasional Indonesia, seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945¹ sungguh amat jelas, dan tinggal menentukan strateginya. Untuk kepentingan ini, dibutuhkan adanya tahapan pembangunan nasional yang direncanakan secara sistematis dan realistis, dilaksanakan secara jujur, sungguh-sungguh dan terus-menerus dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Namun, selama 22 tahun Indonesia merdeka, 1945-1967, ide yang baik ini tidak mudah dilaksanakan. Sebab, sistem politik yang diterapkan pada masa itu adalah sistem demokrasi liberal. Sistem ini bukan memperlancar pembangunan yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, tetapi *malah* menghambat, karena tidak terwujud stabilitas politik dan keamanan.

Dalam sistem demokrasi liberal terdapat banyak partai politik, dan banyaknya partai politik, dengan ideologinya masing-masing, mengakibatkan tidak adanya partai politik yang mempunyai suara mayoritas tunggal di DPR, sehingga setiap kali dilakukan pembentukan kabinet, selalu merupakan Kabinet Koalisi yang terdiri dari tujuh sampai 10 partai politik. Kenyataan ini mengakibatkan terjadi tawar-menawar di antara partai politik pada setiap kali dilakukan pembentukan kabinet: bagaimana komposisi, siapa dan berapa di antara anggota-anggotanya yang akan duduk dalam kabinet. Akibatnya pembentukan kabinet dilakukan secara kompromis, bukan berdasar pada kemampuan pribadi dari yang akan diberi amanat. Dengan demikian, setiap program yang dibuat oleh Kabinet Koalisi selalu merupakan hasil kompromi yang terpaksa.

Akibat dari aneka-ragam ideologi dan program partai-partai politik yang duduk dalam Kabinet Koalisi, maka dalam menjalankan pemerintahan sering terjadi kesulitan dan bahkan

^{•)} Disampaikan dalam acara “Peringatan 66 Tahun Serangan Oemoem 1 Maret 1949” di Monumen Memorial Pak Harto di Kemusuk Bantul, Yogyakarta, pada 28 Februari 2015

^{••)} Dosen Fiqh Siyash dan Direktur Program Pascasarjana STAIN Pekalongan

¹ Yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Lihat, *Pembukaan UUD 1945, alenia IV*.

pertengkar. Partai politik yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah langsung menarik menterinya dari Kabinet, dan anggota DPR yang berasal dari partai tersebut berbalik menentang pemerintah. Kabinet yang baru dibentuk dan menyusun programnya dengan titik tolak memperhatikan kepentingan partai politik yang saat itu mayoritas duduk di Kabinet, dibubarkan. Hal ini terjadi berulang kali,² sehingga banyak program yang sedang dilaksanakan menjadi terlantar.

Keadaan politik yang tidak menentu tersebut masih diiringi pula dengan semakin meluasnya pemberontakan bersenjata di dalam negeri, seperti pemberontakan DI-TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh, serta pemberontakan PRRI-PERMESTA di Sumatera Barat dan Sulawesi, dan puncaknya adalah pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965. Hal-hal tersebut menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dapat dimengerti, jika pada zaman Orde Lama tidak ada satu kabinet pun yang dapat melaksanakan pembangunan secara sempurna. Yang menjadi soal adalah bagaimana Pak Harto, setelah mengemban amanat sebagai presiden dengan Orde Baru-nya, *manage* kepemimpinannya dalam mewujudkan pembangunan nasional.

2. Pak Harto: Tantangan yang Dihadapi dan Cara Mengatasi

Ketika Pak Harto mulai mengernban amanat penderitaan rakyat sebagai Kepala Negara, persoalan utama yang menghadang adalah warisan krisis rezim sebelumnya, yaitu krisis di bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi, terjadi kemerosotan dan stagnasi.³ Sedangkan di bidang politik, terjadi ketidakstabilan, karena pertentangan antar kelompok politik dalam masyarakat. Untuk mengatasi dua krisis ini, Pak Harto mencanangkan strategi pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi, sedang pembangunan politik semata-mata dimaksudkan sebagai penunjang bagi penciptaan stabilitas ekonomi. Dengan strategi ini, maka dirumuskan kebijakan yang disebut dengan Trilogi Pembangunan. Mula-mula disusun dengan rumus: Stabilitas Nasional-Pertumbuhan-Pemerataan. Kemudian berdasarkan penilaian dan merespon tuntutan zaman, maka susunannya dimodifikasi menjadi: Pertumbuhan-Pemerataan-Stabilitas Nasional, dan kemudian untuk memenuhi tuntutan zaman, dimodifikasi lagi menjadi: Pemerataan-Pertumbuhan-Stabilitas Nasional. Uraian mengenai manajemen Pak Harto dalam mengatasi dua krisis tersebut demi pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut.

a. Manajemen Pak Harto di bidang ekonomi

² Selama masa pemerintahan Indonesia pada tahun 1945-1967, tercatat memerintah 25 kabinet, dengan perincian: 7 kabinet bertahan selama 12-23 bulan, 12 kabinet selama 6-11 bulan, dan 6 kabinet selama 1-4 bulan. Dalam kurun itu, terjadi 45 aksi demonstrasi dan 85 huru hara. Sementara 615 orang tewas akibat kekerasan politik. Lihat Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali. 1981). Lihat juga, M. Pamuji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional: Suatu Analisis di Bidang Politik dan Pemerintahan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 119-122.

³ H. W. Arndt (ed.), *Pembangunan dan Pemerataan*, (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 3.

Di bidang ekonomi, masalah pelik yang dihadapi adalah masalah inflasi yang membubung tinggi, neraca pembangunan yang defisit, terkurasnya cadangan devisa negara, dan kesulitan membayar hutang luar negeri.⁴ Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator. *Pertama*, tingkat inflasi mencapai 732 % antara tahun 1964-1965 dan sebesar 697% pada tahun 1965-1966; jumlah uang yang beredar sebesar Rp 47,8 juta pada tahun 1960, dan naik menjadi Rp 14,953 milyar pada September 1966. *Kedua*, anggaran belanja mengalami defisit Rp 6,9 juta pada tahun 1960, dan meningkat menjadi Rp 7,9 milyar pada tahun 1966. *Ketiga*, indeks barang-barang kebutuhan hidup mencapai angka 340 pada tahun 1960 dan melonjak menjadi 200.615 pada tahun 1966. Di Jakarta, indeks harga barang konsumsi sebesar 38,347 pada tahun 1965, dan melonjak menjadi 267,267 pada tahun 1966. *Keempat*, defisit negara sebesar US \$ 27 juta pada tahun 1962 dan naik menjadi US \$ 116,2 pada tahun 1965. *Kelima*, hutang luar negeri sebesar US \$ 18,5 juta pada tahun 1960, dan meningkat menjadi US \$ 3,1 milyar pada September 1966.⁵

Menghadapi persoalan ekonomi yang pelik seperti tersebut, maka agenda modernisasi dalam keyakinan Pak Harto merupakan solusi terbaik dan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pembangunan dan modernisasi merupakan jawaban terbaik bagi Indonesia untuk dapat mengentaskan diri dari berbagai krisis menuju era pembangunan.⁶ Dalam pandangan Pak Harto, modernisasi merupakan sebuah pilihan kebijakan pembangunan yang tepat bagi negara yang sedang dalam taraf perkembangan seperti Indonesia.⁷ Menurut beliau, modernisasi tidak lain hanyalah suatu proses di mana perkembangan diatur, disusun dan diselenggarakan menurut satu pemikiran dengan menggunakan alat-alat yang tersedia, baik material maupun orientasi etis serta ilmu dan keterampilan, untuk mencapai tujuan seefisien mungkin. Salah satu prasyarat utama untuk memasuki modernisasi dalam masyarakat Indonesia yang masih tradisional, adalah diperlukannya perubahan dan pembaruan sistem nilai. Berbagai norma dan nilai lama yang tidak lagi relevan dan menghambat perkembangan harus ditinggalkan. Perubahan nilai-nilai ini bersifat menyeluruh.⁸

⁴ Mengenai masalah ini, lihat Mochtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 28-58.

⁵ Bustomi Hadjd Ronodirdjo dk. (ed), *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*, (Ttp.: Harapan Bandung, 1983), h. 103-4; Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*, (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991), h 47-8. Lihat juga, Anne dan Peter Melawley, *Ekonomi Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1981).

⁶ Leo Suryadinata, *Pak Harto dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1992), h. 32-3. Seperti dicatat Leo, Bapilu terdiri atas beberapa orang dengan latar belakang yang beraneka ragam, mulai dari personel intelejen (Ali Moertopo dan Sodjono Hoemardani), mantan tokoh mahasiswa (Jusuf Wanandi, Sofjan Wanandi, Rachman Tolleng, David Napitupulu, Cosmas Batubara), dan beberapa intelektual (Moerdopo, Sumiskun, Daoed Jusuf), serta golongan pengusaha (Njoo Han Siang).

⁷ Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta, CSIS, 1981), h. 56.

⁸ Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, ..., h. 59.

Dalam rangka demikian, Pak Harto mengambil kebijakan strategis berupa pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar.⁹ Dengan strategi ini, modal-modal dari luar mulai mengalir, terutama dari AS dan Jepang. Di lain pihak, para pengusaha dalam negeri yang kebanyakan golongan non-pri juga memperoleh kesempatan yang baik, karena mereka memiliki modal untuk mengembangkan usaha.¹⁰ Pilihan ini diambil, selain untuk mengantisipasi gejolak masyarakat yang sudah lama hidup melarat dan menyimpan harapan baru dengan datangnya Orde Baru, juga untuk mengalihkan orientasi pembangunan dari yang ideologis-politis pada masa pemerintahan Orde Lama kepada orientasi pragmatis.¹¹

Untuk menindak-lanjuti strategi ini, Pak Harto merumuskan kebijakan yang disebut “tiga ronde tindakan pemerintah di bidang ekonomi” yaitu: kebijakan tanggal 3 Oktober 1966, kebijakan tanggal 10 Februari 1967, dan kebijakan tanggal 28 Juli 1967.¹² Esensi dari kebijakan tanggal 3 Oktober 1966 yang menjadi pijakan pemerintah adalah: *pertama*, menyeimbangkan kebijakan anggaran belanja untuk meniadakan salah satu sebab timbulnya inflasi, yaitu defisit dalam anggaran belanja. *Kedua*, membuka perluasan perdagangan luar negeri yang lebih memberikan keluasaan ruang gerak bagi eksportir. *Ketiga*, memberikan kredit secara selektif dan lebih rendah pada usaha produktif. *Keempat*, melakukan penyelesaian dan penundaan pembayaran hutang-hutang luar negeri untuk mengurangi beban pembayaran dalam rencana anggaran pembayaran. *Kelima*, mengundang penanaman modal asing untuk turut serta membuka kekayaan alam tanah air.¹³ Apabila tidak ada kebijakan yang menjadi pijakan bagi tindakan pemerintah tanggal 3 Oktober 1966, maka inflasi akan lebih mengganas lagi. Mungkin lebih besar dari 1000 Pct setiap tahun. Pendek kata, *miss management* ekonomi, akan menjurus sedemikian rupa, sehingga akhirnya ekonomi Indonesia akan dinyatakan bangkrut.

Sedang kebijakan Pak Harto yang menjadi pijakan bagi kedua tindakan pemerintah tanggal 10 Februari 1967 adalah mengambil serangkaian tindakan di bidang penyesuaian harga dan tarif untuk menghilangkan berbagai kepincangan dalam perbandingan harga dan memberi keuntungan bagi perusahaan-perusahaan untuk memenuhi keperluan dengan sumber pembiayaan sendiri. Kebijakan ini terutama diarahkan pada tercapainya kelancaran arus barang agar dapat memberikan pengaruh positif pada usaha pengendalian inflasi, sambil

⁹ Mochtar Mas'ud, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 28-58 dan 95.

¹⁰ Tentang transformasi ekonomi Orde Baru, lihat, Sjahrir, *Refleksi Pembangunan: Ekonomi Indonesia 1968-1992*, (Jakarta: Gramedia, 1992).

¹¹ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), h. 200.

¹² Bustomi Hadjid Ronodirdjo dkk. (ed), *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*, h. 103-4.

¹³ Bustomi Hadjid Ronodirdjo dkk. (ed), *Presiden Soeharto...*, h. 103-4.

memulihkan sarana dan prasarana produksi. Dalam usaha melancarkan barang, Pak Harto sadar bahwa persediaan devisa merupakan faktor yang paling membatasi kelancaran ini.¹⁴

Adapun kebijaksanaan Pak Harto yang kemudian menjadi pijakan ketiga Tindakan pemerintah tanggal 28 Juli 1967, lebih diprioritaskan pada upaya memperbesar persediaan devisa sebagai bonus ekspor, sehingga lebih merangsang ekspor perusahaan, daftar golongan barang-barang ekspor yang lebih realistis untuk meningkatkan kegiatan ekspor, dan penyederhanaan prosedur ekspor-impor. Usaha-usaha ini disertai dengan Tindakan menurunkan pajak penjualan serta melindungi produksi dalam negeri, tanpa mengganggu usaha laju inflasi.¹⁵

Eksport merupakan bidang yang menjadi garapan intensif Pak Harto. Karena itu, apabila dikaitkan dengan kebijakan tanggal 3 Oktober 1966, ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah. Di antaranya, *pertama*, membuat lebih realistis dalam bidang devisa atau kurs rupiah, yang pada zaman Orde Lama bersifat *over-valued*, sehingga para eksportir dapat menerima hasil rupiah lebih banyak dari pada masa sebelumnya. *Kedua*, menyederhanakan prosedural, baik dalam pengisian formulir administrasi maupun yang berkaitan dengan prosedur perbankan dan Bea Cukai. *Ketiga*, mengurangi beban ekspor, baik mengurangi pajak ekspor maupun pungutan-pungutan lainnya, sehingga lebih besar daya saingnya di luar negeri. Kenaikan kegiatan ekonomi, karena ada investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta serta kemantapan harga, merupakan pendorong ekspor yang kuat, sehingga nilai ekspor yang sebesar US \$ 634 juta pada tahun 1964, meningkat menjadi US \$ 1 milyar lebih pada tahun 1970.¹⁶

Selain itu, untuk mengembangkan ekspor, Pak Harto mengambil kebijakan yang dikenal dengan istilah 3 D (*diversifikasi horizontal, diversifikasi vertikal, dan diversifikasi geografis*)¹⁷ Yang dimaksud *diversifikasi horizontal* adalah bahwa ekspor tidak hanya tergantung pada penjualan minyak bumi dan barang-barang tradisional (karet, kopi, tembakau, dan sebagainya) yang pada tahun 1970 masing-masing baru mencapai US \$ 448 juta dan 669 juta, tetapi harus dikembangkan pada ekspor barang-barang jadi (*craft product*), seperti: barang-barang hasil kerajinan yang berkaitan dengan industri luar negeri.

Sedang yang dimaksud *diversifikasi vertikal* adalah usaha menaikkan mutu ekspor: (1) dari ekspor barang mentah menjadi ekspor barang setengah olah, (2) dari ekspor barang setengah olah menjadi ekspor barang setengah jadi, dan (3) dari ekspor barang setengah jadi menjadi ekspor barang jadi. Dalam hal ini, kemajuan teknologi dalam *semi processing* ke *processing* dan *semi manufacturing* ke *manufacturing* dari barang-barang mentah harus dilakukan.

¹⁴ Bustomi Hadjid Ronodirdjo dkk. (ed), *Presiden Soeharto...*, h. 103-4.

¹⁵ Bustomi Hadjid Ronodirdjo dkk. (ed), *Presiden Soeharto ...*, h. 103-4.

¹⁶ Bustomi Hadjid Ronodirdjo dkk. (ed), *Presiden Soeharto ...*, h. 105.

¹⁷ Bustomi Hadjid Ronodirdjo dkk. (ed), *Presiden Soeharto ...*, h. 106-7.

Adapun yang dimaksud dengan *diversifikasi geografis* adalah memperluas wilayah eksport. Pada tahun 1970, eksport perdagangan Indonesia ke Benua Amerika baru sekitar US \$ 180 juta dan ke Eropa Barat sekitar US \$ 220 juta. Dengan program *diversifikasi geografis*, selain ditingkatkan jumlah eksport di dua wilayah tersebut, juga harus diperluas ke wilayah-wilayah lain, seperti di Pasifik Barat, khususnya negara-negara yang pertumbuhan ekonominya cepat: Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Australia. Selain itu, eksport perlu dikembangkan ke negara-negara Eropa Timur, yang juga merupakan suatu pasar yang berkembang cepat. Sementara kerja sama dengan negara-negara tetangga, seperti dengan Philipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand, tetap harus ditingkatkan. Di bidang pemasaran Kopra, kita bekerja sama dengan Philipina dengan membentuk *Asian Copra Community*; di bidang pemasaran karet, bekerja sama dengan Malaysia, Vietnam Selatan dan Geylon, dengan membentuk *Association of National Rubber Producing Countries*; di bidang pemasaran Lada, bekerja sama dengan Malaysia dan India dengan membentuk *Pattern Community*; di bidang pemasaran Jagung, Tapioka, Kelapa, dan Kayu, bekerja sama dengan Thailand.¹⁸

Dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Harto tersebut, maka hasil yang dirasakan adalah, *pertama*, kembalinya kepercayaan diri bangsa Indonesia, karena dengan demikian kita bisa mengatur ekonomi kita sendiri; terwujudnya kemantapan harga dan rupiah; serta meningkatnya produksi dan kesehatan keuangan negara. *Kedua*, kembalinya kepercayaan Luar Negeri kepada bangsa Indonesia sebagai negara yang kredi *waardig*, sehingga bersedia memberikan bantuan kembali kepada Indonesia.

Di samping itu, Pak Harto juga mengambil kebijakan di bidang koperasi. Yang menjadi masalah adalah tindakan apa yang dilakukan untuk meningkatkan koperasi, dan koperasi jenis apa yang akan mendapat prioritas? Dalam hal ini, kebijakan yang diambil oleh Pak Harto adalah meningkatkan kemajuan koperasi dengan memperbaiki organisasi dan manajemen koperasi, serta membuat lebih banyak koperasi sebagai badan ekonomi, kesatuan ekonomi, dan kesatuan sosial. Selanjutnya, koperasi yang menjadi prioritas adalah koperasi yang bergerak di bidang produksi pangan, sehingga dapat segera meningkatkan pendapatan petani dan menghasilkan devisa. Dalam hal ini, kegiatan koperasi diadakan di unit-unit desa dalam rangka terwujudnya Bimas Nasional, yang bergerak di bidang produksi pangan, bidang perkreditan, bidang *processing*, dan bidang *marketing*. Usaha usaha ini tidak hanya dibatasi dalam Bimas untuk pangan, tetapi bahkan diperluas dalam usaha-usaha Bimas pada hasil-hasil pertanian *corps-product*.

Selain melaksanakan kebijakan sebagaimana tersebut, Pak Harto juga membentuk Dewan Stabilitas Ekonomi yang diketuai langsung beliau dengan staf-staf ahli dari Universitas Indonesia. Mereka adalah Wijoyo Nitisastro, Muhammad Sadli, Emil Salim, Ali

¹⁸ Bustomi Hadjid Ronodirdjo dkk. (ed), *Presiden Soeharto ...*, h. 106. Lihat juga, DPP. Golkar, *30 Tahun PAK HARTO*, (Jakarta: DPP. Golkar, 1994), h. 529-710.

Wardhana, dan Subroto,¹⁹ Sumitro Djojohadikusurno, Radius Prawiro, dan Frans Seda, yang diangkat menjadi Tim Penasehat Ekonomi Presiden berdasarkan Keppres No. 195 tanggal 15 Juni 1968. Para teknokrat ini sudah dikenal beliau jauh sebelumnya, baik secara pribadi maupun melalui Seskoad. Mereka adalah generasi pertama teknokrat Orde Baru dan kemudian didampingi oleh generasi kedua: Sumarlin, Arifin Siregar, dan Adrianus Mooy. Selain itu, untuk mengatasi masalah di bidang ekonomi, Pak Harto Bersama kekuatan utama Orde Baru merumuskan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJP-I). Dalam PJP-I, disusun program jangka panjang 25 tahun I yang dirinci menjadi program 5 tahunan, dan kemudian disambung dengan program jangka Panjang 25 tahun II.

Setelah Indonesia memasuki PJP II atau Era Tinggal Landas selama enam pelita, maka pembangunan ekonomi Indonesia, secara material, dipandang cukup berhasil. Paling tidak, dilihat dari paradigma modernisasi neo-klasik dengan teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil perjuangan Pak Harto dan pemerintah Orde Baru dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, cukup tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi antara tahun 1971-1981 adalah 8%.²⁰ Ketika memulai Repelita I pada tahun 1969, PDB Indonesia (atas dasar harga berlaku dan harga konstan) hanya RP 2.718 miliar dan Rp 4.820,5 miliar. Pada tahun 1991, angka itu melonjak menjadi 226.508,6 miliar dan Rp 123.089,5 miliar.²¹

Laju Inflasi yang sempat mencapai 33,3% pada tahun 1971, dapat ditekan menjadi 9,8% di tahun 1993. Penerimaan pemerintah meningkat dari Rp 1.171,6 miliar di akhir Repelita I, menjadi Rp 62.651,7 miliar di akhir Repelita V. Jumlah penerimaan pajak meningkat dari Rp 535,7 miliar di akhir Repelita I menjadi Rp 34.836,1 miliar di akhir Repelita V. Jumlah dana perbankan meningkat dari Rp 523 miliar di tahun 1972 menjadi Rp 141.947 miliar di tahun 1993. Kredit investasi perbankan juga mengalami kenaikan, dari Rp 92 miliar di tahun 1972 menjadi Rp 31.996 miliar pada tahun 1993. Sedang jumlah uang yang beredar meningkat dari Rp 250,3 miliar di tahun 1970 menjadi Rp 37.037 miliar di tahun 1993.²²

Dalam bidang koperasi, yang merupakan sendi utama kehidupan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, peningkatannya dapat dilihat sebagai berikut. Jumlah koperasi pada tahun 1968 sebanyak 9.339 buah, pada tahun 1994 sudah berlipat menjadi 42.061 buah koperasi. Anggota koperasi yang berjumlah 1.509 juta orang pada tahun 1968, meningkat

¹⁹ Mereka sering disebut “Mafia Berkeley”, karena tempat mereka mengambil gelar PhD adalah Berkeley University, USA. Lihat, R.S. Milne, “Teknokrat dan Politik di Negara-Negara Asia Tenggara”, *Prima*, No. 3, Maret 1984, h. 40. Juga dalam Bruce Glassburner, “Politik Ekonomi dan Pembangunan Orde Baru”, dalam H.W. Arndt (ed), *Pembangunan dan Pemerataan : Indonesia di Masa Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 117-8.

²⁰ Lihat, *World Bank Report*, No. 5066-IND, 1984 seperti dikutip oleh Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*, (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991) h 47-8.

²¹ *Profil Republik Indonesia, Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1993), h. 279-85.

²² M. Irsyad Sudiro, *Partai Golkar Menatap Masa Depan*, (Depok: YAPPINDO, 1998), h. 64-5.

menjadi 36.664 juta orang pada tahun 1994. Jumlah simpanan anggota pada tahun 1968 sebesar Rp 0,3 miliar, pada tahun 1994 meningkat menjadi Rp 1.803,3 miliar. Sedang jumlah nilai usaha yang pada tahun 1968 baru sebesar Rp 74,0 miliar, pada tahun 1994 sudah mencapai Rp 9.496,3 miliar.²³

Berbagai bidang produksi dan usaha mengalami kemajuan yang cukup mengesankan. Dalam bidang pertanian, terjadi peningkatan yang cukup tajam selama PJP I. Produksi padi, dari 17.156 juta ton pada tahun 1968 meningkat menjadi 48 juta ton pada tahun 1993. Jagung, dari 3.165 juta ton pada tahun 1968 meningkat menjadi 6.460 juta ton pada tahun 1993. Ubi kayu, dari 11.356 juta ton pada tahun 1968 meningkat menjadi 17.285 juta ton di tahun 1993. Kacang tanah, dari 287 ribu ton di tahun 1968 menjadi 639 ribu ton di tahun 1993. Sedangkan kedelai, dari 420 ribu ton di tahun 1968 meningkat menjadi 1.709 juta ton di tahun 1993.

Peningkatan pesat juga terjadi dalam bidang perkebunan. Produksi karet meningkat pesat dari 735 ribu ton per tahun di tahun 1968 menjadi 1.413 juta ton di tahun 1993. Kopra, dari 1.133 juta ton di tahun 1968 menjadi 2.479 juta ton di tahun 1993. Kopi, dari 150 ribu ton di tahun 1968 menjadi 442 ribu ton per tahun di tahun 1993. Teh, dari 73 ribu ton di tahun 1968 menjadi 154 ribu ton di tahun 1968. Tembakau, dari 54 ribu ton di tahun 1968 menjadi 115 ribu ton di tahun 1993. Dan gula tebu, dari 749 ribu ton di tahun 1968 menjadi 2.471 juta ton di tahun 1993.²⁴

Bidang perikanan, untuk produksi ikan laut mengalami peningkatan, dari 723 ribu ton/tahun di tahun 1968 menjadi 2.837 ribu ton di tahun 1993. Perikanan budidaya, dari 117 ribu ton di tahun 1968, meningkat menjadi 589 ribu ton di tahun 1993. Demikian pula dengan peternakan. Produksi daging, dari 305 ribu ton di tahun 1968 meningkat menjadi 1.328 juta ton di tahun 1993. Telor, dari 51 ribu ton di tahun 1968 meningkat menjadi 593 ribu ton di tahun 1993. Dan susu, dari 29 juta liter di tahun 1968 meningkat menjadi 413 juta liter di tahun 1993.²⁵

Kehidupan masyarakat juga semakin mengalami peningkatan kesejahteraan dengan beberapa indikasi sebagai berikut. Pendapatan perkapita pertahun rakyat Indonesia dari hanya Rp 20.000,- (US \$ 62) pada tahun 1969 meningkat menjadi Rp 1.038.000,- (US \$ 574) pada tahun 1991.²⁶ Jumlah penduduk miskin menurun, dari 54,2 juta orang (40,1%) pada tahun 1976 menjadi 27,2 juta orang (15,1%) pada tahun 1990 dan menurun lagi menjadi 13,7% di tahun 1993.²⁷ Tingkat partisipasi Pendidikan juga mengalami grafik kenaikan yang tajam. Angka melek huruf naik dari 71,2% pada tahun 1980 menjadi 84,2 % pada tahun 1990. Untuk pendidikan dasar, dari 41,1% di tahun 1968 menjadi 93,5% di tahun 1993. Pendidikan

²³ M. Irsyad Sudiro, *Partai Golkar Menatap Masa Depan*, ..., h. 65

²⁴ M. Irsyad Sudiro, *Partai Golkar Menatap Masa Depan*, ..., h. 65-6

²⁵ M. Irsyad Sudiro, *Partai Golkar Menatap Masa Depan*, ..., h. 67

²⁶ *Profil Republik Indonesia*, ..., h. 279-85

²⁷ *Profil Republik Indonesia*, ..., h. 279-85

menengah pertama, dari 16,9% di tahun 1968 menjadi 43,4% di tahun 1993. Dalam kurun waktu 1980 s.d 1990, jumlah penduduk yang tamat SMP naik 15% menjadi 26,5%.²⁸ Pendidikan menengah atas, dari 8,6% di tahun 1968 menjadi 30,7% di tahun 1993. Sedangkan Pendidikan tinggi, dari 1,6% di tahun 1968 menjadi 9,5% di tahun 1993.²⁹

Dalam bidang kesehatan, kita jumpai data-data yang juga mendukung adanya tingkat kesejahteraan masyarakat PJP I. Angka kematian bayi, misalnya, mengalami penurunan, dari 137/1000 bayi kelahiran hidup di akhir Repelita I (1973/1974) menjadi 58/1000 kelahiran hidup di akhir Repelita V (1993/1994). Angka harapan hidup juga mengalami kenaikan rata-rata dari 46,5 tahun di akhir Repelita I, menjadi 62,7 tahun di akhir Repelita V. Rata-rata jumlah dokter yang semula 4,9 per 100.000 penduduk di akhir Repelita I, meningkat menjadi 16,9 orang per 100.000 di akhir Repelita V. Demikian juga dengan fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas, yang pada akhir Repelita I hanya berjumlah 1,9 buah per 100.000 penduduk, menjadi 3,6 buah per 100.000 penduduk di akhir Repelitas V. Jumlah Rumah Sakit (RS) meningkat juga, pada akhir Repelita I terdapat 581 RS dengan 63.643 tempat tidur, menjadi 830 RS dengan 97.197 jumlah tempat tidur di akhir Repelita V.³⁰

Angka-angka di atas hanyalah sebagian indikasi dari berbagai kemajuan yang telah berhasil dicapai, yang secara langsung dan konkret dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Dari sejumlah keberhasilan yang dicapai oleh Pak Harto bersama Orde Baru seperti dikemukakan di atas bukan berarti tidak ada kekeliruan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesenjangan sosial yang cukup mencolok, sehingga sering muncul adanya kritik terhadap konglomerasi dan kesenjangan sosial ekonomi yang tajam. Pada tahun 1994, terdapat 20.633 desa tertinggal yang penduduknya masih miskin.³¹ Pada akhir tahun 1980-an terdapat 29 konglomerat nonpri (WNI keturunan Cina) dari 40 konglomerat terbesar Indonesia. Peringkat 1 hingga 8 ditempati oleh pengusaha non-pri, baru diikuti oleh seorang pengusaha pribumi. Dari 20 peringkat teratas, hanya terdapat 6 pengusaha pribumi, dan 4 orang di antaranya memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat atau mantan pejabat tinggi negara.³²

Dilihat dari perkiraan persentase pembagian pendapatan (*expenditure*) dan Indeks Gininya di Indonesia, maka Soemitro Djojohadikusumo menuangkannya dalam bentuk table berikut.³³

²⁸ *Profil Republik Indonesia, ...*, h. 357

²⁹ M. Irsyad Sudiro, *Partai Pak Harto Menatap Masa Depan, ...*, h. 67

³⁰ M. Irsyad Sudiro, *Partai Pak Harto Menatap Masa Depan, ...*, h. 67-8

³¹ *Harian Republika*, tanggal 6 Juni 1994

³² Yoon Hwan Shin, *Demystifying on the Capitalist State: Political Patronage, Bureaucratic Interest, and Capitalist -in- Formation in Suharto's Indonesia*, (tpp.: Yale University Press, 1989), p. 213-6, 2018.

³³ Dikutip dari Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan, ...*, h. 55

Tahun	40 % berpendapatan rendah	40 % berpendapatan sedang	40 % berpendapatan tinggi
1984	20,75%	37,28%	42,10%
1987	20,87%	37,48%	41,65%

b. Manajemen Pak Harto di bidang politik

Pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utama Pak Harto seperti dikemukakan di atas hanya bisa berlangsung, jika keadaan politik stabil, yang pada dua dekade pasca kemerdekaan merupakan barang mahal dan sulit tercipta. Karena itu, pembangunan sistem politik yang dapat menjaga kelancaran pembangunan ekonomi yang tentu saja berbeda dari sistem politik versi Orde Lama menjadi kebutuhan mutlak.³⁴

Dalam rangka demikian, Pak Harto berupaya menciptakan sistem politik baru yang dapat mewujudkan stabilitas nasional, sehingga memperlancar pembangunan ekonomi. Untuk tujuan ini, Pak Harto berkepentingan memperoleh basis massa guna melegitimasi rezim yang dibangunnya. Basis tersebut diperoleh melalui partai politik, karena partai politik memiliki fungsi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.³⁵ Dalam hal ini, Pak Harto berusaha mendekati partai politik yang ada pada saat itu, yaitu NU dan PNI, agar bersedia dijadikan basis legitimasi politik bagi tatanan politik yang benar-benar baru. Namun, para elite kedua partai politik ini justru “menantang” pemerintah dengan menuntut agar pemilu ditiadakan secepatnya.³⁶ Akhirnya, Pak Harto tidak merangkul kedua partai politik ini, tetapi memilih Sekber Golkar.³⁷ Menurut Herald Crouch,

³⁴ R.S. Milne, *Teknorat dan Politik di Negara-Negara Asia Tenggara*, dalam Prisma, No.3, Maret, 1984, h. 40. Lihat juga, Bruce Glassburner, “Politik Ekonomi dan Pembangunan Orde Baru”, dalam H.W. Aranandt (ed.), *Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru*, (Bandung: Pustaka Salman, 1981), h. 117-8.

³⁵ Untuk mengetahui fungsi dari partai politik, lihat antara lain: Miriam Budiardjo (ed.), *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1981); Ichlasul Amal (ed.), *Teori-teori Mutakhir Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1983); Joseph La Palombara dan Myron Weiner, *Political Parties and Political Development*, (tp.: Princeton University Press, 1966); dan Maurice Duverger, *Partai-partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981).

³⁶ Bung Karno, misalnya, sebagai tokoh PKI dan Presiden -yang kekuasaannya semakin berkurang- dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1966, menantang Soeharto dkk. agar segera mengadakan pemilu untuk mengetahui kehendak rakyat. Pidato Bung Karno ini dikenal dengan nama Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah). Lihat, Harold Crouch, *Militer dan Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), h. 230. Secara logis, tantangan tersebut bisa dibenarkan, karena mereka memiliki peluang sangat besar untuk menambang suara. Namun, secara strategis, tantangan itu tidak tepat. Sebab, ada kesan, seakan-akan kekuatan politik yang ada “meremehkan” posisi dan kemampuan Soeharto. Lihat, Riswandha Imawan, “Golkar: Cita-Cita dan Realita” dalam Andreas Pandiangan, *Menggugat Kemandirian Golkar*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1996), h. xii.

³⁷ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 28. Keengganan pemerintah merangkul parpol-parpol yang ada pada saat itu, karena: (1) khawatir terhadap kemungkinan tampilnya kembali Bung Karno “yang didukung oleh PKI” dan (2) trauma masa lalu yang berupa “pembangkangan” tokoh-tokoh Islam dan isu negara Islam. Bagi pemerintah, bukan masanya lagi membicarakan persoalan-persoalan ideologis, peranan partai-partai politik, dan

Soeharto berkeinginan untuk menggunakan sebuah kelompok independent yang diketuai oleh para cendekiawan yang anti-Soeharto dan anti-PKI untuk dikembangkan menjadi sebuah partai, tetapi kemudian ia meninggalkan gagasan ini dan menjatuhkan pilihannya kepada Sekber Golkar.³⁸

Selanjutnya, untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas politik, Pak Harto, bersama unsur lain Orde Baru mengambil kebijakan dengan lebih menekankan pada pendekatan keamanan (*security approach*), bukan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Dalam rangka demikian, Pak Harto melakukan “pembagian tugas.” Pihak militer menjalankan pendekatan keamanan, teknokrat menerapkan pembangunan ekonomi, sedang Golkar merumuskan dan mendukung kebijakan di parlemen. Dirumuskanlah konsep AHGT (Ancaman, Hambatan, Gangguan, dan Tantangan) sebagai “musuh” yang harus diatasi dalam kehidupan bangsa.

Kemudian untuk melancarkan agenda pembangunan, tahap awal yang harus dijalankan adalah penertiban politik yang diwujudkan dalam control yang ketat terutama terhadap dinamika kepartaian ketika itu. Stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dalam penilaian para intelektual yang mendukung kebijakan Pak Harto merupakan agenda mendesak untuk diwujudkan. Seperti dicatat oleh Liddle, pandangan kaum intelektual pro modernisasi terhadap politik di Indonesia berlandaskan dua asumsi dasar: (1) politik dan ekonomi adalah aspek-aspek yang erat berkaitan dengan seluruh sistem sosial, dengan perubahan pada yang kedua (ekonomi) sebagian besar bergantung pada perubahan pada aspek yang pertama (politik); (2) perlunya memberikan stigmatisasi terhadap partai-partai yang mereka pandang lebih berorientasi pada ideologi dan bukan pada program (pembangunan).³⁹

Atas dasar itu dan untuk menerapkan konsep AHGT sebagaimana telah disinggung di atas, Pak Harto bersama unsur lain Orde Baru berupaya menciptakan sistem politik baru yang

lain sebagainya yang bercorak ideologis-politis. Lihat, Alfian, *Pemikiran dan Pembaharuan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1980), h. 2-3.

Adapun penguatan Sekber Golkar dilakukan dengan: (1) mula-mula pimpinan Angkatan Darat menempatkan orang-orangnya dalam pimpinan Sekber Golkar dan melakukan reorganisasi dengan membuat kino-kino dalam Golkar untuk menampung kelompok independen/intelektual yang ada dalam koalisi, (2) mengeluarkan Peraturan Mendagri No. 12/1969 dan PP No. 6 Tahun 1970 tanggal 11 Februari 1970 tentang larangan pegawai negeri menjadi anggota parpol; (3) menuntut monoloyalitas pegawai negeri kepada Golkar, kecuali ada izin khusus dari pimpinannya jika ingin terlibat dalam parpol; dan (4) membangun organisasi *underbouw* melalui jaringan korporatis untuk menggalang massa, seperti Korpri untuk pegawai negeri, AMPI untuk pemuda, GUPPI untuk Pendidikan, dan MDI untuk da'wah. Penguatan Golkar seperti ini setidaknya-didaksudkan untuk; (a) melemahkan sistem kepartaian sambil memperbesar dominasi negara dengan militer sebagai aktor utama serta menghilangkan dominasi parlemen; dan (b) membangun legitimasi formal untuk negara dalam rangka mengefektifkan kontrol dan kooptasi terhadap masyarakat. Lihat lebih lanjut dalam, Julian M. Boileau, *Golkar: Functional Group Politics in Indonesia*, (Jakarta: CSIS, 1983), h. 91.

³⁸ Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, (Cornell University Press, 1988), h. 245-252.

³⁹ R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, (Jakarta, LP3ES, 1992), h. 4.

dapat mewujudkan stabilitas nasional, sehingga memperlancar pembangunan ekonomi. Pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nasional, dengan pengalaman politik sebelumnya, mengharuskan Pak Harto mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menciptakan suatu tertib politik yang bebas dari konflik ideologis-politis.⁴⁰ Yakni, dengan menolak parpol yang berbau ideologis-politis dan menyederhanakannya, melalui fusi partai, menjadi dua: PPP dan PDI,⁴¹ ditambah dengan Golkar. Hal ini, karena partai politik dianggap sebagai penghalang modernisasi dan pembangunan,⁴² bahkan sebagai penggerak keresahan rakyat.⁴³

Pencitraan buruk atas partai-partai ini, sebagaimana dicatat oleh Liddle, antara lain karena anggapan bahwa: (1) partai-partai lebih berorientasi “ideologi” daripada “program;” (2) partai-partai memperuncing ketegangan ideologis di kalangan rakyat Indonesia, baik di tingkat elite maupun di tingkat massa; partai-partai menciptakan ketegangan organisasi di dalam masyarakat;

Para pemimpin partai pada dasarnya adalah orang-orang yang mencari kesempatan untuk diri sendiri, serta lebih tertarik pada kesejahteraan mereka sendiri dan sekutu-sekutu mereka daripada kepentingan umum; pemimpin-pemimpin partai terasing dari para pemilih yang semestinya mereka wakili; kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem kepartaian tidak terbatas pada organisasi partai saja, tetapi juga pada lembaga-lembaga lainnya; sistem banyak partai dianggap sebagai sumber utama ketidakstabilan pemerintah parlementer.⁴⁴

Kedua, membatasi partisipasi politik yang pluralistic. Yakni, dengan mengarahkan partai politik hanya pada penerapan program pembangunan yang dirancang oleh elite politik.⁴⁵ Alternatifnya, Pak Harto membesarkan Golkar sambil “mengecilkan” partai-partai politik.

⁴⁰ Julian M. Boileau, *Pak Harto: Functional Group Politics in Indonesia*, h. 149

⁴¹ Kenyataannya, fusi partai inilah yang menjadi pangkal konflik internal, karena unsur-unsur dalam partai selalu bersaing memperebutkan kursi dan pengaruh. Lihat, M. Rusli Karim. *Perjalanan Partai-partai Politik, Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta: Rajawali, 1983). Mengenai konflik dalam tubuh PPP, lihat, Syamsudin Haris, *PPP dan Peta Politik Orde Baru*, (Jakarta: Grasindo, 1991); Umaid Radi, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*, (Jakarta: Integritas Press, 1984); dan Syaifuddin Zuhri (et.al.), *PPP, NU, dan MI: Gejolak Wadah Politik Islam*, (Jakarta: Integritas Press, 1984) Tentang konflik PDI, lihat, Adriana Elisabeth Sukamto (dkk.), *PDI dan Prospek Pembangunan Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1983)

⁴² Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, h. 246

⁴³ Leo Suryadinata, *Pak Harto dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*, h. 27 dan 38. Von Der Mehden menyebut bahwa selama satu decade lebih, sejak munculnya Orde Baru, pemerintah menganggap segala usaha yang mengancam pemerintahan -dan menciptakan suatu negara islam-sebagai bahaya. Lihat, Fred R. Von Der Mehden, “Islam dan Negara di Indonesia dan Malaysia”, dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (peny.), *Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 124. Lihat juga, William Liddle, *Partisipasi Partai Politik Indonesia pada Masa Orde Baru*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1992), h. 133.

⁴⁴ R. William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia Pada Awal Orde Baru*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1992), h. 94-8.

⁴⁵ Miriam Budihardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1981). Lihat juga, Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, h. 206.

Dengan cara demikian, maka sejak pemilu pertama tahun 1971, dalam masa pemerintahan Orde Baru, terbentuklah sistem kepartaian yang hegemonik (*Hegemonic Party System*) dengan Golkar sebagai partai politik dominan, sedang PPP dan PDI hanya berfungsi artifisial dan pemanis.⁴⁶ Di dalam *Hegemonic Party System* (HPS), eksistensi partai-partai politik dan organisasi sosial diakui, tetapi peranannya dibuat seminimal mungkin, terutama dalam pembentukan pendapat umum. HPS tercipta, jika suatu parpol mendominasi proses politik suatu negara dalam kurun waktu yang lama.⁴⁷

3. Penutup

Dalam uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen yang dilakukan oleh Pak Harto untuk meraih tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD '45 adalah dengan melaksanakan pembangunan, terutama bidang ekonomi. Karena pembangunan di bidang ekonomi membutuhkan stabilitas keamanan, sedang sumber instabilitas keamanan adalah bidang politik, maka pembangunan di bidang politik juga dilaksanakan oleh Pak Harto.

Pembangunan di bidang ekonomi semua dilakukan dengan berorientasi keluar untuk mendatangkan dana dari luar negeri, sehingga krisis dapat diatasi. Kemudian Pak Harto Bersama kekuatan utama Orde Baru menyusun Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJP-I). Dalam PJP-I, disusun program jangka Panjang 25 tahun I yang dirinci menjadi program 5 tahunan berikutnya, dan kemudian disambung dengan program jangka Panjang 25 tahun II. Kalau saja pembangunan yang dirancang Pak Harto berlanjut sampai sekarang, maka Indonesia pasti lebih maju dari yang sekarang ada. Dengan hening, kita berdoa, semoga amal dan perjuangan beliau diterima oleh Allah dan kesalahannya diampuni, dan kita -sebagai generasi penerus- dapat melanjutkannya. Selamat Jalan Bapak Pembangunan Bangsa. Semoga kita bisa bertemu di sorga nanti. Amin.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1966).
Adriana Elisabeth Sukamto (dkk.), *PDI dan Prospek Pembangunan Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1983)
Afan Gaffar, *Javanese Voters, a Case Study of Election under a Hegemonic Party System*, (Yogyakarta: UGM Press, 1992).
Alfian, *Pemikiran dan Pembaharuan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1980)..
Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta, CSIS, 1981).
Anne dan Peter Melawley, *Ekonomi Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1981).
Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali. 1981).
Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*, (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991).

⁴⁶ Afan Gaffar, *Javanese Voters, a Case Study of Election under a Hegemonic Party System*, (Yogyakarta: UGM Press, 1992), h. 36-7. Lihat juga, Deliar Noer, *Ideologi, Politik, dan Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Pekhidmatan, 1983), h. 73.

⁴⁷ Afan Gaffar, *Javanese Voters*, h. 36-7.

- Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*, (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991).
- Bruce Glassburner, “Politik Ekonomi dan Pembangunan Orde Baru”, dalam H.W. Arnandt (ed), *Pembangunan dan Pemerataan : Indonesia di Masa Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1988).
- Bruce Glassburner, “Politik Ekonomi dan Pembangunan Orde Baru”, dalam H.W. Aranandt (ed.), *Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru*, (Bandung: Pustaka Salman, 1981).
- Bustomi Hadjd Ronodirdjo dk. (ed), *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*, (Ttp.: Harapan Bandung, 1983).
- Deliar Noer, *Ideologi, Politik, dan Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Pekhidmatan, 1983).
- DPP. Golkar, *30 Tahun PAK HARTO*, (Jakarta: DPP. Golkar, 1994).
- Fred R. Von Der Mehden, “Islam dan Negara di Indonesia dan Malaysia”, dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (peny.), *Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985).
- H. W. Arndt (ed.), *Pembangunan dan Pemerataan*, (Jakarta: LP3ES, 1983).
- Harian Republika, tanggal 6 Juni 1994
- Harold Crouch, *Militer dan Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986).
- Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, (Cornell University Press, 1988).
- Ichlasul Amal (ed.), *Teori-teori Mutakhir Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1983).
- Joseph La Palombara dan Myron Weiner, *Political Parties and Political Development*, (ttp.: Princeton University Press, 1966).
- Julian M. Boileau, *Golkar: Functional Group Politics in Indonesia*, (Jakarta: CSIS, 1983).
- Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Leo Suryadinata, *Pak Harto dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1992).
- M. Irsyad Sudiro, *Partai Golkar Menatap Masa Depan*, (Depok: YAPPINDO, 1998).
- M. Pamuji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional: Suatu Analisis di Bidang Politik dan Pemerintahan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)
- M. Rusli Karim. *Perjalanan Partai-partai Politik, Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta: Rajawali, 1983).
- Maurice Duverger, *Partai-partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981).
- Miriam Budiardjo (ed.), *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1981);
- Mochtar Mas’oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Pembukaan UUD 1945, alenia IV.*
- Peraturan Mendagri No. 12/1969
- PP No. 6 Tahun 1970 tanggal 11 Februari 1970 tentang Larangan Pegawai Negeri Menjadi Anggota Parpol
- Profil Republik Indonesia, Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1993).
- R. William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia Pada Awal Orde Baru*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1992).
- R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, (Jakarta, LP3ES, 1992).
- R.S. Milne, “Teknokrat dan Politik di Negara-Negara Asia Tenggara”, *Prima*, No. 3, Maret 1984.
- Riswandha Imawan, “Golkar: Cita-Cita dan Realita” dalam Andreas Pandiangan, *Menggugat Kemandirian Golkar*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1996).
- Sjahrir, *Refleksi Pembangunan: Ekonomi Indonesia 1968-1992*, (Jakarta: Gramedia, 1992).

- Syaifuddin Zuhri (et.al.), *PPP, NU, dan MI: Gejolak Wadah Politik Islam*, (Jakarta: Integrita Press, 1984).
- Syamsudin Haris, *PPP dan Peta Politik Orde Baru*, (Jakarta: Grasindo, 1991);
- Umaid Radi, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*, (Jakarta: Integritas Press, 1984).
- William Liddle, *Partisipasi Partai Politik Indonesia pada Masa Orde Baru*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1992).
- World Bank Report*, No. 5066-IND, 1984
- Yoon Hwan Shin, *Demystifying on the Capitalist State: Political Patronage, Bureaucratic Interest, and Capitalist -in- Formation in Suharto's Indonesia*, (http.: Yale University Press, 1989).